

ANALISIS TINGKAT PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN: STUDI KASUS BANK DOMINAN DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2017



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RIADHUS SHOLIHIN
NIM. 12020113130092

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Riadhus Sholihin

Nomer Induk Mahasiswa : 12020113130092

Fakultas / Departemen : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PERSAINGAN
DALAM INDUSTRI PERBANKAN:
STUDI KASUS BANK DOMINAN DI
INDONESIA TAHUN 2007-2017**

Dosen Pembimbing : Firmansyah, S.E.,M.Si.,Ph.D.

Semarang, 19 Maret 2018
Dosen Pembimbing,

Firmansyah, S.E.,M.Si.,Ph.D.
NIP. 19740427 199903 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Riadhus Sholihin
Nomer Induk Mahasiswa : 12020113130092
Fakultas / Departemen : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN: STUDI KASUS BANK DOMINAN DI INDONESIA TAHUN 2007-2017**
Dosen Pembimbing : Firmansyah, S.E.,M.Si.,Ph.D.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Maret 2018

Tim penguji

1. Firmansyah, S.E.,M.Si.,Ph.D. (.....)
2. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS. (.....)
3. Maruto Umar Basuki, S.E.,M.Si. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, S.E.,M.Com.,Ph.D.Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Riadhus Sholihin, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS PERILAKU PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN: STUDI KASUS BANK DOMINAN DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2017, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tulisan ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil tulisan saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,

Riadhus Sholihin
NIM. 12020113130092

“Oligopoly theory predicts that market price will be at least as high as the competitive price and no higher than the monopoly price. Particular oligopoly solution concepts offer more exact predictions, but it is difficult to know which solution concept holds in any real market.”

(Bresnahan, 1982)

‘I’ (an oligopolist) cannot define my best policies unless I know what ‘You’ (my rival) are going to do; by the same token, however, you cannot define your the best move unless you know what I will do.

(Asch, 1969, p.54)

ABSTRACT

This research aims to analyze the degree of competition in the Indonesian banking industry that especially in the competition of credit distribution and the effect of implementing the transparency policy of prime lending rate to the quantity of lending and the level of competition. In the Indonesian banking industry has highly concentrated lending market structure, this highly concentrated market indicates that some of the banks have higher monopoly power. Owning higher producer power, indicating the financial institution have higher potential for collusion. The Business Competition Supervisory Commission revealed that there is conjecture tacit collusin in national banking industry. Collusion action can trigger performance inefficiency of financial institution and causing loss in economy, considering credit is widely used by society. Through the implementation of the prime lending rate transparency policy, central bank of Indonesia improving the good governance and promoting healthy competition in Indonesian Banking industry. This research uses data with pre- and post- transparency policy of prime lending rate in between year 2007 to 2017. This research uses New Empirical Industrial Organization approach and Bresnahan-Lau model which uses structural equation for estimating the monopoly power (unobserve variable). The method uses in this research is using Two Stage Least Square. The result show that although the Indonesian banking industry has a relatively high concentration level, but the competition faced by each bank is fairly competitive and the conjecture of the tacit collusion activities is not proven. This result is also show that the implementation of the transparency policy of prime lending rate get good response from the public, especially the borrowers but the application of the transparency policy of prime lending rate considered not able influence the level of competition.

Keyword : monopoly power, degree of competition, the transparency policy of prime lending rate, Two Stage Least Square

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri perbankan nasional khususnya pada persaingan penyaluran kredit dan efek dari penerapan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) terhadap kuantitas kredit maupun tingkat persaingan. Industri perbankan nasional memiliki struktur pasar penyaluran kredit yang cenderung terkonsentrasi, struktur pasar yang terkonsentrasi mengindikasikan bahwa beberapa bank dominan memiliki kekuatan produsen (*monopoly power*) yang relatif tinggi. Kepemilikan kekuatan produsen dengan derajat yang relatif tinggi meningkatkan potensi bagi lembaga keuangan untuk melakukan praktek tindakan kolusi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa terdapat dugaan adanya praktek tindakan kolusi yang dilakukan secara diam-diam (*tacit collusin*) dalam industri perbankan nasional. Tindakan kolusi dinilai dapat memicu kinerja lembaga keuangan menjadi kurang efisien dan dinilai dapat merugikan bagi perekonomian mengingat kredit digunakan oleh masyarakat secara luas. Melalui penerapan kebijakan transparansi SBDK, Bank Indonesia berusaha untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan mendorong tingkat persaingan sehat dalam industri perbankan nasional. Penelitian ini menggunakan data dengan periode waktu pra dan pasca penerapan kebijakan transparansi SBDK yaitu 2007-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan *New Empirical Industrial Organization* (NEIO) dan model yang digunakan adalah *Bresnahan-Lau* (B-L) yang menggunakan persamaan struktural untuk mengestimasi derajat kekuatan produsen, menurut model tersebut untuk mengestimasi kekuatan produsen yang hakikatnya adalah variabel yang tidak teramati (*unobserve variable*) diperlukan persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat terkecil dua tahap (TSLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun industri perbankan nasional memiliki tingkat konsentrasi yang relatif tinggi namun persaingan yang dihadapi masing-masing bank cukup kompetitif dan dugaan mengenai adanya praktek kegiatan kolusi secara diam-diam (*tacit collusin*) dinilai tidak terbukti. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan transparansi SBDK mendapatkan respon baik dari masyarakat khususnya para debitur namun penerapan transparansi SBDK dinilai belum mampu untuk mempengaruhi tingkat persaingan.

Kata Kunci: Kekuatan Produsen, Tingkat Persaingan, Kebijakan Tranparansi SBDK, Kuadrat Terkecil Dua Tahap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur kepada-Nya karena telah menuntun penulis dalam melewati setiap hambatan yang diberikan hingga penulis masuk perguruan tinggi negeri dan menyelesaikannya.

Penulis telah lama memiliki ketertarikan terhadap kekuatan produsen atau dikenal dengan *monopoly power* sejak mengikuti mata kuliah ekonomi mikro I dengan dosen pengampu Prof. Dr. FX. Sugianto, MS dan Evi Yulia Purwanti, M.Si. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai kekuatan produsen dari berbagai artikel dan mata kuliah yang diajarkan selama menjalani perkuliahan. Ketertarikan penulis terhadap kekuatan produsen berlanjut ketika penulis mengikuti berbagai mata kuliah yang didasari pada teori ekonomi mikro khususnya mata kuliah ekonomi industri (ekonomi industri I maupun ekonomi industri II). Penulis mengikuti mata kuliah ekonomi industri I yang diampu oleh Wahyu Widodo Ph.D dan Alfa Farah M.Sc. penjelasan komprehensif yang diberikan kedua dosen pengampu kepada penulis dinilai sangat berperan bagi penulis dalam memahami konsep kekuatan produsen. Penulis tertarik dengan konsep kekuatan produsen pada model *Cournot* yang diajarkan oleh Alfa Farah M.Sc pada waktu itu, penulis kemudian mempelajari dan berusaha memahami lebih jauh konsep tersebut. Pembahasan komprehensif konsep kekuatan produsen juga diberikan oleh Wahyu Widodo Ph.D pada model *Cournot*, *Chamberlin* dan *Bertrand* dalam mata kuliah industri I maupun industri II. Ketertarikan penulis pada konsep-konsep tersebut khususnya *Cournot* mendasari penulis untuk menjadikannya kerangka berfikir dalam skripsi.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pengalaman, kesempatan, dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi sarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pertama, Kepada Suharnomo selaku dekan FEB Undip, kepada Firmansyah Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah yang pernah penulis ikuti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D. serta Wahyu Widodo, Ph.D. atas diskusi yang penulis nilai sangat berharga. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Alfa Farah M.Sc dan Evi Yulia Purwanti, M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berdiskusi mengenai beberapa topik diluar jam kuliah selama penulis menempuh pendidikan di FEB Undip.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman IESP angkatan 2013 Universitas Diponegoro. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Kholidi Arsani, SE.Sy (kholidun) yang telah memberikan contoh kepada penulis untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Penulis mengucapkan

terima kasih kepada saudara penulis yaitu Khamdani Ikhsan S.T. (UGM) yang telah menjadi contoh bagi penulis untuk terus berusaha mengejar masa depan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Danu Hadibrata, S.Si.(penulis tidak tahu gelar terakhir) yang telah mengajari penulis dalam memahami dasar-dasar matematika serta mengubah cara berfikir penulis mengenai peran matematika dalam membentuk logika dan menunjukkan bagaimana matematika terlihat sangat luar biasa.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada teman-teman yang sering penulis repotkan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada ibu/bpk kost yang pernah penulis tinggali. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada teman sepermainan tenis meja yang telah bersedia menjadi lawan bagi penulis dan telah bersedia untuk kalah secara berurutan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis Khusnul Ma'arif dan Khuzaimah, adik penulis Novi Nur Jannah serta kakek dan nenek penulis Sumardjo, Almh. Sakinah dan Almh. Kesrag yang telah menemani penulis.

Semarang, 19 Maret 2018
Penulis,

Riadhus Sholihin
NIM. 12020113130092

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Oligopoli	15
2.1.1.1 Kekuatan Produsen.....	21
2.1.2 <i>New Empirical Industrial Organization</i> (NEIO)	24
2.1.2.1 Model <i>Bresnahan-Lau</i> (B-L)	27

2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1 Output (Kredit) dan Input (Deposito)	41
3.1.2 Harga Kredit	42
3.1.3 Output Perekonomian	42
3.1.4 Produk Substitusi	43
3.1.5 Kebijakan Transparansi SBDK.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Metode Analisis.....	45
3.5.1 Model Empiris	46
3.5.2 Identifikasi Model.....	51
3.5.3 Permasalahan Simultanitas	52
3.5.4 Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik	53
3.5.5 Inferensi Statistik	56
3.5.5.1 Uji Statistika t.....	57
3.5.5.2 Uji Statistika F	57
3.5.5.3 Uji Statistika R^2 dan Adjusted R^2	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60

4.1.1 Kuantitas Kredit dan Kondisi Perekonomian	63
4.1.2 Kekuatan Produsen dan Kebijakan Transparansi SBDK.....	69
4.1.3 Sertifikat Bank Indonesia dan Dana Pihak Ketiga (Deposito).....	73
4.2 Analisis Data	75
4.2.1 Hasil Uji Simultanitas	76
4.2.2 Hasil Uji Masalah Identifikasi	78
4.2.3 Hasil Uji Hausman.....	81
4.2.4 Hasil Estimasi	81
4.2.4 Hasil Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik.....	85
4.2.4.1 Hasil Uji Normalitas	85
4.2.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
4.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	88
4.2.4.4 Hasil Uji Serial Korelasi	89
4.2.5 Hasil Uji Inferensi Statistik.....	92
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	97
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Simpulan.....	100
5.2 Keterbatasan	101
5.3 Saran.....	102
5.3.1 Implikasi Kebijakan.....	102
5.3.2 Penelitian Selanjutnya.....	102
Daftar Pustaka	104
Lampiran-Lampiran	107

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PANGSA PASAR KREDIT KELOMPOK BANK UMUM	8
TABEL 1.2 PANGSA PASAR BANK DOMINAN	9
TABEL 2.1 PENDEKATAN BRESNAHAN-LAU	27
TABEL 2.2 PENELITIAN TERDAHULU PENERAPAN MODEL B-L	37
TABEL 3.1 DESKRIPSI VARIABEL	44
TABEL 4.1 EKSPEKTASI TANDA KOEFISIEN	76
TABEL 4.2 HASIL UJI SPESIFIKASI HAUSMAN	78
TABEL 4.3 HASIL UJI KONDISI URUTAN	79
TABEL 4.4 TABULASI MODEL	80
TABEL 4.5 HASIL UJI HAUSMAN	81
TABEL 4.6 HASIL ESTIMASI KUANTITAS KREDIT	82
TABEL 4.7 HASIL ESTIMASI HARGA KREDIT	84
TABEL 4.8 HASIL UJI NORMALITAS	86
TABEL 4.9 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS	87
TABEL 4.10 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	88
TABEL 4.11 HASIL UJI SERIAL KORELASI	90
TABEL 4.12 KOEFISIEN DETERMINASI	96
TABEL 4.13 F-STATISTIK	97
TABEL 4.14 RINGKASAN HASIL ESTIMASI	98

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 DAMPAK KEKUATAN PRODUSEN	17
GAMBAR 3.1 REAKSI PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN VARIABEL Y	48
GAMBAR 3.2 REAKSI PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN VARIABEL Y DAN Z	49
GAMBAR 4.1 KUANTITAS KREDIT MENURUT KELOMPOK BANK (MILIAR Rp).....	64
GAMBAR 4.2 PERHITUNGAN SUKU BUNGA KREDIT DAN SBDK	66
GAMBAR 4.3 PANGSA PASAR MENURUT KELOMPOK BANK UMUM	68
GAMBAR 4.4 ALOKASI DANA KELOMPOK BANK UMUM DALAM BENTUK SBI (SERATUS MILIAR Rp)	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1 PENURUNAN REDUCE FORM.....	107
LAMPIRAN 1.2 GAMBARAN PERKEMBANGAN SBDK.....	108
LAMPIRAN 1.3 PERKEMBANGAN JUMLAH BANK.....	115
LAMPIRAN 1.4 PERKEMBANGAN JUMLAH KANTOR BANK	116
LAMPIRAN 1.5 HASIL UJI HAUSMAN (<i>FIXED EFFECT</i> ATAU <i>RANDOM EFFECT</i>).....	118
LAMPIRAN 1.6 HASIL REDUCE FORM.....	119
LAMPIRAN 1.7 HASIL ESTIMASI	120
LAMPIRAN 1.8 UJI NORMALITAS DAN ASUMSI KLASIK.....	121

DAFTAR ISTILAH

Kekuatan produsen	: Kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi harga terhadap produk yang ditawarkan.
<i>Conjectural variation</i>	: Ekspektasi oligopolis atas reaksi pesaing dalam merespon suatu perubahan (harga maupun output).
<i>Cournot equilibrium</i>	: Titik keseimbangan dari persaingan perusahaan yang memiliki besaran kekuatan produsen yang sama.
<i>Cooperative</i>	: Kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan para perusahaan pesaing untuk memaksimalkan penerimaan laba bersama.
<i>Non-cooperative</i>	: Kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan secara <i>independent</i> dalam memaksimalkan penerimaan laba perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Struktur industri perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan secara dramatis pasca penerapan berbagai kebijakan pemerintah. Perubahan struktur industri perbankan tersebut dimulai dari deregulasi sektor moneter tahun 1983 (PAKJUN 83). Berangkat dari kondisi stagnan, PAKJUN 83 mampu meningkatkan situasi persaingan industri perbankan nasional. PAKJUN 83 memuat deregulasi beberapa aturan antara lain: menghapus pagu kredit, membebaskan penentuan tingkat suku bunga (kredit, deposito, maupun tabungan) dan mengakhiri kredit likuidasi Bank Indonesia (kecuali kredit tertentu). Menilai fungsi intermediasi belum berada pada posisi maksimal, pemerintah mengeluarkan deregulasi lanjutan tahun 1988 (PAKTO 88).

Penerapan PAKTO 88 memberikan dampak terhadap peningkatan beberapa jumlah bank dan kantor bank¹, menurut Bank Indonesia jumlah kelompok bank umum bulan Maret 1990 mencapai 119 dengan jumlah kantor sebesar 2.392. Kelompok Bank umum mengalami pertambahan sebesar 40 bank dan 809 kantor yang terdiri dari bank umum pemerintah, bank umum swasta nasional (BUSN), dan Bank asing/campuran. Pertambahan terbesar terjadi pada BUSN sebesar 28 bank dan 716 kantor, bank asing/campuran sebesar 12 bank dan 19 kantor, bank umum pemerintah mengalami peningkatan jumlah kantor sebesar 74, namun jumlah bank

¹ Melalui PAKTO 88 pemerintah membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional dengan modal minimum sebesar 10 miliar.

tidak mengalami peningkatan. Kondisi persaingan kelompok bank umum tahun 1990 didominasi oleh BUSN sebesar 91 bank dan 1.460 kantor. Tingginya jumlah BUSN juga disebabkan kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan terhadap pihak bank untuk melakukan peleburan usaha, penggabungan usaha (*merger*) dan peningkatan status.

Perkembangan jumlah bank di Indonesia bertambah dengan sangat cepat pasca penerapan PAKTO 88, namun pengelompokan bank dipersempit menjadi kelompok bank umum dan BPR². Tahun 1997 Bank Indonesia mencatat jumlah kelompok bank umum sudah mencapai 238 bank, jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan menurunkan kualitas pengawasan. Keterbatasan kemampuan otoritas moneter dalam mengawasi kegiatan intermediasi memberikan dampak negatif terhadap kinerja perbankan nasional. Kondisi tersebut memotivasi pemerintah membentuk kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan (*restrukturisasi*) serta menindaklanjuti perbankan yang dinilai bermasalah atau melakukan pelanggaran. Kebijakan pemerintah meliputi peningkatan syarat pendirian bank, mendorong kegiatan penggabungan usaha, konsolidasi, dan menetapkan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha.

Bank Indonesia tercatat telah mencabut izin usaha 16 bank umum dari 54 bank yang dinilai bermasalah pada 1 November 1997. Tindakan tersebut ditempuh sebagai upaya memulihkan kepercayaan masyarakat yang terus menurun terhadap kinerja perbankan. Kegagalan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ditengah situasi yang kurang menguntungkan, berbalik menyudutkan

² Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 tentang Perbankan.

posisi perbankan dan memperburuk keadaan. Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran (*bank run*) menimbulkan masalah likuiditas. Ketidakstabilan kondisi sosial politik nasional mendorong krisis perbankan pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan dan memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai program penyelamatan perbankan.

Penerapan berbagai program pemerintah sebagai reaksi atas situasi yang mengkhawatirkan berangsur-angsur memberikan sinyal positif terhadap struktur dan pengendalian perbankan. Tahun 2004 pemerintah menerapkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai upaya lanjutan dalam membentuk struktur perbankan yang relatif ideal. Tercatat tahun 2001 jumlah bank umum yang beroperasi sebesar 145 bank dengan 6.765 kantor, sedangkan pasca penerapan API tahun 2006 jumlah bank umum berubah menjadi 130 bank dengan 9.110 kantor. Penerapan API menumbuhkan optimisme positif industri perbankan nasional sejalan dengan peningkatan kinerja perbankan dan perekonomian yang semakin kondusif. Peningkatan tersebut mencerminkan pelaksanaan intermediasi secara bertahap mengalami pemulihan dalam menghimpun maupun menyalurkan dana.

Menurut Bank Indonesia tahun 2007 penghimpunan dana pihak ketiga³ (DPK) mencapai Rp1.510,7 triliun, sedangkan penyaluran dana (kredit) mencapai Rp1.045 triliun lebih besar dari target yang ditentukan. Pemulihan fungsi intermediasi tersebut diikuti oleh tekanan krisis keuangan global pada akhir triwulan III tahun 2008. Memburuknya situasi keuangan global memberikan

³ Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada pihak bank berdasarkan perjanjian penyimpanan (Giro, Deposito, dan Tabungan).

dampak negatif terhadap perekonomian diberbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak krisis keuangan global tersebut mempengaruhi kondisi makroekonomi (sektor riil) dan memiliki potensi secara signifikan terhadap memburuknya fungsi intermediasi di industri perbankan nasional.

Menurut Bank Indonesia terganggunya sektor riil meningkatkan potensi intensitas transmisi krisis keuangan global terhadap sektor finansial dalam bentuk penurunan kemampuan penyaluran kredit. Perilaku agresif perbankan dalam menyalurkan kredit tahun 2008 secara bertahap mengalami penurunan. Perbankan mulai meningkatkan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan meningkatkan sentimen negatif terhadap kredit bermasalah. Tercatat tahun 2009 penyaluran kredit tumbuh melambat hanya sebesar 8,7% (yoy). Memburuknya kondisi penyaluran kredit nasional berhasil diatasi pada tahun 2010 dengan ekspansi kredit mencapai 22,8% (yoy) dan didukung oleh ketersediaan dana pihak ketiga yang memadai dengan pertumbuhan sebesar 18,5% (yoy).

Pemulihan fungsi intermediasi pasca krisis keuangan global memotivasi pemerintah mengarahkan kebijakan tahun 2011 untuk meningkatkan peran intermediasi dan efisiensi dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan mendorong tingkat persaingan industri perbankan menjadi lebih kompetitif. Tingkat persaingan yang kompetitif dinilai mampu meningkatkan efisiensi perbankan⁴. Melalui implementasi kebijakan transparansi informasi suku bunga dasar kredit (SBDK)⁵, diharapkan persaingan

⁴ Menurut Hafidz dan Astuti (2013) meningkatnya tingkat persaingan akan memicu pihak Bank untuk meningkatkan kinerja perbankan pada tingkat yang lebih efisiensi.

⁵ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/5/DPNP 8 Februari 2011, perbankan dengan total aset sebesar 10 triliun diwajibkan untuk melakukan publikasi informasi mengenai SBDK.

dalam industri perbankan menjadi lebih sehat dan kompetitif melalui disiplin pasar yang lebih baik mampu tercapai.

Menurut Bank Indonesia SBDK merupakan batas bawah tingkat suku bunga kredit yang mencerminkan biaya produksi, mencakup margin perbankan. SBDK merupakan salah satu faktor determinan penentu tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan pihak bank kepada debitur. SBDK ditentukan berdasarkan perhitungan atas 3 komponen: harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead, dan margin keuntungan. Melalui penerapan kebijakan transparansi SBDK, debitur mampu mempertimbangkan antara manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan beberapa bank sebelum menentukan pilihan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya tawar debitur, disisi lain penerapan kebijakan transparansi SBDK diduga menempatkan posisi perbankan pada situasi yang relatif kurang menguntungkan.

Meningkatnya persaingan dalam kegiatan menyalurkan dana dinilai dapat menekan tingkat suku bunga kredit (Setiabudi, 1999). Kondisi tersebut menuntut pihak perbankan untuk melakukan kegiatan intermediasi secara lebih efisien sehingga mampu menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif atau mendekati biaya marjinalnya. Widyastuti dan Armanto (2013) memberikan penjelasan bahwa peningkatan persaingan akan memberikan dorongan bagi lembaga keuangan untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga yang ditawarkan kompetitor kepada debitur. Suku bunga merupakan kalkulasi antara SBDK dengan

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP 15 Januari 2013 pihak perbankan juga diwajibkan untuk mempublikasikan SBDK kredit mikro.

premi resiko yang ditetapkan perbankan terhadap debitur. Menurut Setiabudi (1999) mekanisme menentukan tingkat suku bunga melalui proses yang kompleks dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang harus diperhatikan dalam menentukan suku bunga kredit antara lain: *Cost of funds*, *Overhead cost*, premi keuntungan dan premi resiko. Faktor eksternal dalam penetapan suku bunga kredit adalah tingkat bunga pasar terutama bunga yang ditawarkan bank pesaing dan kebijakan maupun instrumen yang dimiliki otoritas moneter atau fiskal. Bank dituntut untuk mengalkulasikan suku bunga kredit dengan cermat, penentuan tingkat suku bunga kredit yang tidak tepat dapat berdampak terhadap kurang optimalnya perolehan pendapatan bunga bagi pihak perbankan.

Mengacu pada implementasi transparansi SBDK bulan Maret 2011, kebijakan tersebut diduga mempengaruhi pendapatan atas bunga kredit. Menurut Bank Indonesia pasca penerapan kebijakan tersebut, tingkat SBDK terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut diiringi dengan penurunan perolehan pendapatan atas bunga kredit pada tahun 2012, disisi lain persaingan dalam industri perbankan dinilai mengalami peningkatan (Hafidz dan Astuti, 2013). Meningkatkan tingkat persaingan sebagai salah satu tujuan penerapan kebijakan SBDK berpotensi menurunkan tingkat konsentrasi dalam struktur persaingan industri perbankan nasional.

Menurut Widyastuti dan Armanto (2013) kondisi persaingan industri perbankan nasional mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya jumlah perbankan. Berbagai penerapan regulasi turut mendorong menurunnya jumlah perbankan, secara tidak langsung kondisi tersebut merubah situasi persaingan dan

struktur industri perbankan nasional. Penurunan tingkat persaingan juga didorong oleh karakteristik pasar yang dihadapi perbankan. Karakteristik pasar khususnya kredit dibangun berdasarkan pengalaman penyaluran kredit kepada debitur periode sebelumnya. Dorongan memaksimalkan perolehan laba serta pertimbangan mengenai risiko kerugian apabila kondisi pasar dalam situasi bersaing turut berperan dalam penurunan tingkat persaingan. Tingkat persaingan industri perbankan nasional dinilai telah mengalami perubahan. Kondisi persaingan monopolistik pada masa konsolidasi berubah menjadi persaingan oligopoli kolusif⁶.

Perdebatan mengenai tingkat persaingan dalam industri perbankan merupakan salah satu kajian menarik. Beberapa penelitian (Allen dan Gale, 2004; Beck, et al., 2007) menilai bahwa tingkat persaingan yang rendah dianggap relatif lebih baik dibanding tingkat persaingan yang tinggi atau kompetitif. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa *monopoly power* (kekuatan produsen) beberapa bank memiliki derajat relatif tinggi. Bank memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga (suku bunga) dan kuantitas penawaran kredit. Secara teoritis bank dalam situasi tersebut akan menentukan suku bunga (tinggi terhadap kredit, rendah terhadap deposito) dan kuantitas kredit yang dapat memaksimalkan penerimaan laba (Shaffer, 1994). Kondisi tersebut dinilai kurang menguntungkan, sehingga dalam beberapa penelitian (Demsetz, 1973; Schaeck dan Čihák, 2008) menganggap bahwa persaingan yang kompetitif dinilai lebih baik dibanding persaingan yang memiliki kecenderungan terkonsentrasi.

⁶ Menurut Widyastuti dan Armanto (2013) persaingan pada masa konsolidasi pra-API dinilai relatif kompetitif, namun pasca API tingkat persaingan menurun sampai pada posisi oligopoli kolusif.

Struktur pasar dengan kecenderungan terkonsentrasi dinilai memiliki potensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan (Shaffer, 1994). Penerapan regulasi tertentu bertujuan secara khusus untuk menurunkan tingkat konsentrasi dengan meningkatkan situasi persaingan, sehingga dampak negatif diharapkan mampu diminimalisasi. Ekspektasi pemerintah mengenai peningkatan tingkat persaingan melalui penerapan transparansi informasi SBDK, diduga berpotensi memiliki dampak terhadap perubahan tingkat penguasaan pangsa pasar.

Tabel 1.1 Pangsa Pasar Kredit Kelompok Bank Umum

Kelompok Bank Umum	Jumlah Bank		Jumlah kantor Bank		Pangsa Pasar (%)	
	2011	2017	2011	2017	2011	2017
Bank Persero	4	4	4.214	18.121	36,20	40,70
BUSN Devisa	36	42	6.771	9.533	40,85	39,50
BUSN Non Devisa	31	21	1.187	478	2,86	1,17
BPD	26	27	1.437	4.064	8,23	8,18
Bank Campuran	14	12	245	341	5,33	4,94
Bank Asing	10	9	215	82	6,53	5,51

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pasca penerapan transparansi SBDK penguasaan pangsa pasar mengalami pergeseran. bank persero menunjukkan posisi dominan dengan pangsa pasar mencapai 36,20% Maret 2011, sementara Maret 2017 telah mencapai 40,70%. Peningkatan pangsa pasar tersebut diikuti penurunan pangsa pasar pada bank lainnya.

Pangsa pasar penyaluran kredit nasional didominasi oleh bank persero diikuti BUSN devisa dengan nilai relatif tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pasar penyaluran kredit terkonsentrasi pada bank persero dan BUSN devisa. Menurut Lipczynski, et al (2005) tingkat konsentrasi merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi pembentukan struktur pasar. Pasar dengan tingkat konsentrasi relatif tinggi berpotensi menciptakan struktur pasar oligopoli maupun

monopoli, sedangkan pasar dengan tingkat konsentrasi relatif rendah mampu menciptakan struktur pasar monopolistik. Salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar adalah *consentration ratio* (rasio konsentrasi) yang dikalkulasi dari data penjualan beberapa perusahaan atau perbankan terbesar. Menurut Lipczynski, et al (2005) pada umumnya ratio konsentrasi untuk sejumlah perusahaan (CR_n) terbesar dikelompokkan menjadi CR_3 , CR_4 , CR_5 dan CR_8 . Tinggi-rendahnya tingkat konsentrasi diduga mempengaruhi derajat kepemilikan kekuatan produsen bagi pihak bank. Kekuatan produsen pada derajat relatif tinggi dinilai memiliki dampak negatif berupa peningkatan inefisiensi dan penurunan tingkat kesejahteraan bagi konsumen (Martin, 1994).

Mengacu pada hasil dari Tabel 1.1 bahwa pangsa pasar terbesar penyaluran kredit didominasi oleh kelompok bank persero diikuti BUSN devisa. Beberapa bank kelompok tersebut diduga memiliki pangsa pasar relatif besar dan berpotensi mempengaruhi perilaku bank terkait dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit.

Tabel 1.2 Pangsa Pasar Bank Dominan

Nama Bank	Kredit (Juta Rupiah)		Pangsa Pasar (%)	
	2011	2017	2011	2017
PT BANK RAKYAT INDONESIA	249.164.659	653.106.941	15,26	15,74
PT BANK MANDIRI	221.483.977	585.052.475	13,56	14,10
PT BANK CENTRAL ASIA	150.338.218	408.909.629	9,21	9,86
PT BANK NEGARA INDONESIA	134.694.255	375.050.901	8,25	9,04
PT BANK CIMB NIAGA	106.685.580	160.124.620	6,53	3,86
PT BANK TABUNGAN NEGARA	50.352.522	154.873.205	3,08	3,73
PT PAN INDONESIA BANK	61.011.811	119.728.083	3,74	2,89
PT MAYBANK INDONESIA	52.178.800	93.773.441	3,20	2,26
PT BANK OCBC NISP	30.831.719	92.542.830	1,89	2,23

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Pasar penyaluran kredit nasional Tabel 1.2 menunjukkan 9 bank dominan dengan tingkat konsentrasi CR_3 , CR_4 , CR_5 dan CR_8 secara berurutan sebesar 38,03%, 46,28%, 52,81% dan 62,83%. Tingkat konsentrasi tersebut mencerminkan bahwa

Maret 2011 pasar penyaluran kredit kelompok bank umum dikuasai 8 bank sebesar 62,83%. Peningkatan jumlah bank, *merger*, perubahan nama bank, dan berbagai penerapan strategi lainnya diduga berpengaruh terhadap tingkat penyaluran kredit dari 9 bank tersebut. Maret 2017 tingkat konsentrasi dengan CR_3 , CR_4 , CR_5 dan CR_8 telah mencapai 39,70%, 48,74%, 52,60%, dan 61,48%, dengan tingkat konsentrasi tersebut diduga beberapa bank memiliki kekuatan produsen pada derajat relatif tinggi.

Kekuatan produsen merupakan kemampuan perusahaan mempengaruhi harga terhadap produk yang ditawarkan (Martin, 1994). Kekuatan produsen dinilai menjadi salah satu faktor determinan profitabilitas perbankan dan perilaku persaingan (Bikker, 2003). Pindyck dan Rubinfeld (2005) menjelaskan bahwa dalam kegiatan memaksimalkan penerimaan laba perusahaan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuatan produsen. Tindakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan harga, mengurangi produksi output dan menghalangi perusahaan lain masuk pasar. Penelitian ini berusaha mengkaji derajat kekuatan produsen dan perilaku persaingan dari 9 bank dominan pasca penerapan kebijakan SBDK dengan menggunakan model *Bresnahan-Lau* dan penelitian ini juga berusaha mengkaji efek dari penerapan kebijakan transparansi SBDK terhadap derajat kekuatan produsen maupun terhadap kuantitas kredit. Penelitian ini menggunakan *fixed effect* yang dipilih berdasarkan dari hasil uji hausman dan data yang digunakan adalah data panel dari 9 bank dominan tahun 2007-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat konsentrasi industri perbankan nasional dalam penyaluran kredit pasca penerapan kebijakan transparansi SBDK masih tergolong pada kategori relatif tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa beberapa bank diduga memiliki kekuatan produsen dengan derajat yang tinggi. Motivasi memaksimalkan perolehan laba berpotensi mendorong pihak bank untuk mengeksploitasi kekuatan produsen. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan laba, menurunkan ketidakpastian dan dianggap sebagai langkah untuk menghindari persaingan yang bersifat saling menghancurkan. Penelitian ini berusaha mengkaji derajat kekuatan produsen yang digunakan sebagai indikator tingkat persaingan bank dominan dalam industri perbankan nasional dan reaksi masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Apakah tingkat *monopoly power* pada industri perbankan nasional mengarah pada monopoli atau persaingan sempurna?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan transparansi SBDK terhadap tingkat persaingan dari 9 bank utama (dominan)?
3. Bagaimana perbedaan permintaan kredit pra dan pasca kebijakan transparansi SBDK?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri perbankan nasional pra dan pasca penerapan kebijakan transparansi SBDK dengan mengadaptasi model struktural *Bresnahan-Lau*, selain itu penelitian

ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat khususnya debitur terhadap kebijakan transparansi SBDK. Tujuan spesifik penelitian adalah:

1. Menganalisis tingkat *monopoly power* 9 bank dominan dalam industri perbankan nasional.
2. Menganalisis pengaruh penerapan kebijakan transparansi SBDK terhadap rata-rata tingkat *monopoly power* 9 bank dominan dalam industri perbankan nasional.
3. Menganalisis pengaruh penerapan kebijakan transparansi SBDK terhadap kuantitas kredit dari 9 bank dominan dalam industri perbankan nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis maupun praktis. Manfaat penelitian secara akademis adalah memperkaya kajian ekonomi industri dengan topik kekuatan produsen. Manfaat penelitian secara praktis memberikan gambaran mengenai perilaku perbankan dalam menanggapi kebijakan transparansi SBDK yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pembuat regulasi untuk menilai kinerja perbankan pada struktur pasar yang tercipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini memberikan penjelasan dan penjabaran yang dipaparkan pada masing-masing bab. Setiap bab merupakan rangkaian dari tahapan penulisan, disusun sebagai berikut:

Bab 1 memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian dengan memaparkan secara singkat mengenai perkembangan jumlah bank yang beroperasi,

perilaku persaingan bank, serta perkembangan regulasi yang mengarahkan persaingan industri perbankan nasional. Fokus bahasan dalam latar belakang penelitian adalah memberikan pemaparan mengenai penerapan kebijakan transparansi SBDK terhadap persaingan beberapa bank dominan dalam industri perbankan nasional.

Bab 2 memberikan penjelasan mengenai penjabaran landasan teori, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran. Landasan teori memuat penjabaran teori oligopoli untuk mendekati perilaku persaingan dalam industri perbankan, dilanjutkan teori organisasi industri dengan pokok pembahasan mengenai pendekatan *New Empirical Industrial Organization* (NEIO) sebagai landasan dalam membangun model pada penelitian ini. Bagian selanjutnya dalam Bab 2 menjelaskan secara singkat mengenai konsep kekuatan produsen, dilanjutkan pembahasan mengenai Model *Bresnahan-Lau* (B-L). Tinjauan pustaka pada Bab 2 membahas kajian mengenai penerapan model B-L dalam menguji eksistensi kekuatan produsen pada industri perbankan.

Bab 3 memberikan pembahasan mengenai metodologi penelitian, pembahasan mengenai model pengukuran kekuatan produsen, dan pembahasan mengenai variabel penelitian beserta data dan sumbernya.

Bab 4 memberikan penjelasan mengenai analisis data-data yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan produsen pada 2007-2017 kuartal 1. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai hasil estimasi dan pembahasan mengenai model *Bresnahan-Lau*.

Bab 5 memberikan penjelasan mengenai simpulan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian. Bagian ini juga berisi saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya pada topik sejenis.